



LAPORAN KEUANGAN

p

AUDITED 2020

**BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JABODETABEK**

Jl. MT Haryono Kav. 45 -46
Jakarta (12770)

Tlp. (021) 22791400
Email. bptj@dephub.go.id



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan dan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2021

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK



POJANA B PRAMESTI
Pemuka Utama Madya (IV/d)
NIP. 19611102 198703 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	6
I. LRA.....	8
II. NERACA.....	9
III. LAPORAN OPERASIONAL	10
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	12
A. Penjelasan Umum.....	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
VI. LAMPIRAN	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merupakan tanggung jawab UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2021

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK



POLINA PRAMESTI
Pengguna Utama Madya (IV/d)
NIP. 19611102 198703 2 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK



BOSITA SINAGA, SH., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620904 198903 2 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.244.521.290,00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.244.521.290,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0,00. Target PNBPN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek TA 2020 tidak terdapat dalam DIPA karena tidak ada pagu penggunaan PNBPN TA 2020, namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, target PNBPN BPTJ sebesar Rp5.709.150.000,00 dan telah realisasi 91,86 persen yaitu sebesar Rp5.244.521.290,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp225.070.281.970,00 atau mencapai 98,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp227.635.890.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp534.164.854.395,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.767.892.257,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp429.641.427.220,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp102.755.534.918,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp534.164.854.395,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.529.521.700,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp169.764.315.348,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp165.234.793.648,00), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp648.835.669,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp164.585.957.979,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp478.925.051.694,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp164.585.957.979,00) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar (Rp0,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp219.825.760.680,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp534.164.854.395,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LRA

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	CATATAN	31-Dec-20		% thd Angg	31-Dec-19
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		5.244.521.290		6.335.263.186
JUMLAH PENDAPATAN		-	5.244.521.290		6.335.263.186
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	20.292.987.000	20.005.809.019	98,58	18.802.861.091
Belanja Barang	B.4	83.461.317.000	81.295.122.626	97,40	70.211.553.787
Jumlah Belanja Operasi		103.754.304.000	101.300.931.645	97,64	89.014.414.878
Belanja Modal	B.5				
Belanja Tanah	B.5.1				-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.2	75.570.998.000	75.472.204.975	99,87	42.771.945.209
Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.3	2.027.835.000	2.027.178.000	99,97	11.611.467.000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.5.4				
Belanja Modal Lainnya	B.5.5	46.282.753.000	46.269.967.350	99,97	24.978.784.500
Jumlah Belanja Modal		123.881.586.000	123.769.350.325	99,91	79.362.196.709
JUMLAH BELANJA		227.635.890.000	225.070.281.970	98,87	168.376.611.587

Jakarta, April 2021

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK



POLINA B PRAMESTI
Pemimpin Utama Madya (IV/d)
NIP. 19611102 198703 2 001

II. NERACA

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK NERACA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

URAIAN	CATATAN	31-Dec-20	31-Dec-19
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNPB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.6	-	262,400,000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	1,312,000
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	1,767,892,257	964,627,840
Persediaan Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		1,767,892,257	1,225,715,840
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	152,859,956,635	152,859,956,635
Tanah Belum Diregister		-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	225,297,943,070	173,096,272,318
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.15	149,304,046,043	147,276,868,043
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	26,827,564,023	26,827,564,023
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	47,148,750	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	- 124,695,231,301	- 80,110,329,551
Jumlah Aset Tetap		429,641,427,220	419,950,331,468
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	105,738,642,550	59,398,730,200
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	165,803,000	-
Aset Lainnya Belum Diregister		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	- 3,148,910,632	- 1,649,725,814
Jumlah Aset Lainnya		102,755,534,918	57,749,004,386
JUMLAH ASET		534,164,854,395	478,925,051,694
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	534,164,854,395	478,925,051,694
JUMLAH EKUITAS		534,164,854,395	478,925,051,694
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		534,164,854,395	478,925,051,694

Jakarta, April 2021

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK

 POLANA S PRAMESTI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19611102 198703 2 001

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	CATATAN	31-Dec-20	30-Dec-19
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4,529,521,700	6,298,160,935
JUMLAH PENDAPATAN		4,529,521,700	6,298,160,935
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	20,005,809,019	18,802,861,091
Beban Persediaan	D.3	2,485,144,762	3,626,912,641
Beban Barang dan Jasa	D.4	65,455,296,358	34,066,529,855
Beban Pemeliharaan	D.5	14,394,674,743	6,260,101,021
Beban Perjalanan Dinas	D.6	21,340,615,898	26,039,655,671
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	46,084,086,568	36,046,634,213
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	- 1,312,000	1,312,000
Beban Lain-Lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		169,764,315,348	124,844,006,492
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		- 165,234,793,648	- 118,545,845,557
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		580,800	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		- 580,800	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.12	- 580,800	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		749,010,045	760,340,548
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		99,593,576	655,220,257
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya	D.13	649,416,469	105,120,291
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		- 164,585,957,979	- 118,440,725,266
POS LUAR BIASA	D.14	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.15	- 164,585,957,979	- 118,440,725,266

Jakarta, April 2021

KEPALA

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK



POLINA B PRAMESTI

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19611102 198703 2 001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	CATATAN	31-Dec-20	31-Dec-19
EKUITAS AWAL	E.1	478,925,051,694	438,155,645,199
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	- 164,585,957,979	- 118,440,725,266
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4	- -	2,831,216,640
LAIN-LAIN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	219,825,760,680	162,041,348,401
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	55,239,802,701	40,769,406,495
EKUITAS AKHIR	E.8	534,164,854,395	478,925,051,694

Jakarta, April 2021



KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK

POCANA B PRAMESTI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19611102 198703 2 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek khususnya sampai dengan tahun 2017 adalah “Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”. Pelayanan perhubungan yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan perhubungan yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan pekerjaan terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek periode 31 Desember 2020 diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, yang mana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memiliki satu Satker dengan empat Pejabat Pembuat Komitmen

Rincian kegiatan berdasarkan revisi DIPA/POK 9 sebagai berikut:

Rekapitulasi Kegiatan Per Unit Eselon 2

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek	63.556.917.000
2.	Peningkatan, Penyediaan Pelayanan Angkutan Orang, Angkutan barang serta Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	43.189.704.000
3.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	82.027.743.000
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	38.861.526.000

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan telah dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak sembilan kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp406.587.093.000,00 setelah direvisi terakhir menjadi sebesar Rp227.635.890.000,00 sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2020

Uraian	2020	
	2020	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	25.189.700.000	20.292.987.000
Belanja Barang	120.611.810.000	83.461.317.000
Belanja Modal	260.785.583.000	123.881.586.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	406.587.093.000	227.635.890.000

Estimasi anggaran/target PNPB dalam halaman III DIPA BPTJ TA 2020 tidak muncul dikarenakan BPTJ tidak mengusulkan pagu penggunaan PNPB di TA 2020.

Pada tahun 2020 DIPA awal BPTJ sebesar Rp406.587.093.000,00. Pada bulan April 2020 terdapat pemotongan anggaran untuk prioritas kebutuhan dan penanggulangan dampak COVID-19 senilai Rp187.751.203.000,00 dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran dengan surat nomor: S-711/AG/2020 tanggal 29 April 2020 perihal pengesahan revisi anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kemenhub TA 2020. Pada bulan September, BPTJ melakukan optimalisasi anggaran dengan merealokasi belanja pegawai sebesar Rp5.700.000.000,00 dan menambah kegiatan baru senilai Rp12.500.000.000,00 sehingga pagu anggaran BPTJ bertambah senilai Rp8.800.000.000,00 (Rp12.500.000.000,00 - Rp5.700.000.000,00) penambahan tersebut merupakan realokasi antar program dari optimalisasi kinerja anggaran Kementerian Perhubungan.

Realisasi
Pendapatan
Rp5.244.521.290,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.244.521.290,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Dalam halaman III DIPA TA 2020, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tidak memiliki target penerimaan, namun demikian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mendapat target PNBPA TA 2020 dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp5.709.150.000,00 sehingga realisasi PNBPA terhadap pagu posisi 31 Desember 2020 sebesar 91,86%.

Pendapatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 5.244.521.290,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	5.244.521.290	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 17,22 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.244.521.290	6.335.263.186	(17,22)
Jumlah	-	6.335.263.186	-

Realisasi
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp5.244.521.290,00

B.1.1 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.244.521.290,00 dan Rp6.335.263.186,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami penurunan sebesar 17,22% dari TA 2019. Hal ini disebabkan menurunnya PNBPA dari perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek akibat menurunnya permintaan pengguna jasa angkutan akibat pandemi Covid-19.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Rincian Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	%
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	4.692.050.000	6.035.050.000	(1.343.000.000)	(22,25)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8.128.500	-	8.128.500	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	100	270	(170)	(62,96)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	299.095.935	299.501.980	(406.045)	(0,14)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	153.503.555	-	153.503.555	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	91.743.000	710.935	91.032.065	12.804,56
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	1	(1)	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
Jumlah	5.244.521.090	6.335.263.186	- 1.090.742.096	(17,22)

Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya senilai Rp4.692.050.000,00 berasal dari PNBPF Fungsional yaitu Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang dan Penerbitan Kartu Pengawasan Perizinan Angkutan Orang di Wilayah Jabodetabek.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp8.128.500,00 (Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) berasal keterlambatan pekerjaan tahun anggaran 2019 yaitu PT Argya Prana Dipta senilai Rp687.000,00 dan CV Mitra Duta Kreasindo senilai Rp7.441.500,00.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp100,00 (Seratus Rupiah).

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp299.095.935,00 berasal dari kelebihan pembayaran belanja barang TA 2019, dengan rincian penerimaan terlampir.

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp153.503.555 berasal dari PT Manunggaling Rizki Karyatama Telnics senilai Rp20.992.000,00, PT Fanitra Indotama senilai Rp130.586.555,00, dan PT Argya Prana Dipta Rp1.925.000,00.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp91.743.000,00 berasal dari pendapatan sewa lahan di Terminal Jatijajar oleh PT Indosat.

*Realisasi Belanja
Rp225.070.281.970,
00,-*

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp225.070.281.970,00 atau 98,87% dari anggaran belanja sebesar Rp227.635.890.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan TA 2020

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	20.292.987.000	20.005.809.019	98,58
Belanja Barang	83.461.317.000	81.295.122.626	97,40
Belanja Modal	123.881.586.000	123.769.350.325	99,91
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	227.635.890.000	225.070.281.970	98,87

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 2019

U R A I A N	Rincian Realisasi Belanja		
	2020	2019	% naik/(turun)
Belanja Pegawai	20.005.809.019	18.802.861.091	6,40
Belanja Barang	81.295.122.626	70.211.553.787	15,79
Belanja Modal	123.769.350.325	79.362.196.709	55,96
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	225.070.281.970	168.376.611.687	33,67

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp20.005.809.019,
00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.005.809.019,00 dan Rp18.802.861.091,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai digunakan untuk memberikan gaji bulanan, Gaji ketiga belas, Gaji Keempat belas (tunjangan hari raya), uang lembur, uang makan dan tunjangan kinerja bulanan kepada 148 pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,40% dari TA 2019. Kenaikan belanja pegawai disebabkan bertambahnya jumlah pegawai di tahun 2020 dari 125 pegawai menjadi 148 pegawai, namun kenaikan tersebut tidak signifikan dikarenakan pada tahun 2020 terdapat kebijakan terkait pemberian tunjangan hari raya dari gaji dan dari tunjangan kinerja yaitu tidak diberikannya tunjangan hari raya kepada pejabat eselon I dan II dan tidak diberikannya tunjangan hari raya dari tunjangan kinerja untuk semua pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2019	%
Belanja Gaji Pokok PNS	6.520.485.560	5.785.251.540	12,71
Belanja Pembulatan Gaji PNS	98.772	93.928	5,16
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	480.675.060	405.487.292	18,54
Belanja Tunj. Anak PNS	138.201.172	116.407.222	18,72
Belanja Tunj. Struktural PNS	725.130.000	659.100.000	10,02
Belanja Tunj. Fungsional PNS	19.790.000	14.010.000	41,26
Belanja Tunj. PPh PNS	35.032.386	31.059.158	12,79
Belanja Tunj. Beras PNS	346.095.180	301.069.160	14,96
Belanja Uang Makan PNS	1.194.178.000	380.444.000	213,89
Belanja Tunjangan Umum PNS	250.355.000	233.305.000	7,31
Belanja Uang Lembur	263.332.000	297.762.000	- 11,56
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	10.032.435.939	10.578.879.263	- 5,17
Jumlah Belanja kotor	20.005.809.069	18.802.868.563	6,40
Pengembalian Belanja Pegawai	50	7.472	- 99,33
Jumlah Belanja	20.005.809.019	18.802.861.091	6,40

Realisasi Belanja
Barang
Rp45.766.237.355
,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp82.098.408.675,00 dan Rp70.211.553.787,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 15,79% dari Realisasi TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2019	%
Belanja Barang Operasional	21.103.284.090	15.463.622.325	36,47
Belanja Barang Non Operasional	13.912.065.396	13.200.953.967	5,39
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.496.981.880	3.824.274.840	43,74
Belanja Jasa	7.466.864.399	5.428.865.063	37,54
Belanja Pemeliharaan	11.989.865.963	6.254.181.921	91,71
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	21.384.175.508	25.509.775.081	- 16,17
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	529.880.590	- 100,00
Jumlah Belanja Kotor	81.353.237.236	70.211.553.787	15,87
Pengembalian Belanja	58.114.610	-	-
Jumlah Belanja	81.295.122.626	70.211.553.787	15,79

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp4.380.091.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.183.875.445,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5=4/3
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	294.000.000	233.200.000	79,32
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1.454.579.000	1.366.661.100	93,96
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	2.317.012.000	2.270.514.345	97,99
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	314.500.000	313.500.000	99,68
	JUMLAH	4.380.091.000	4.183.875.445	95,52

Realisasi Belanja
Modal
Rp123.769.350.32
5,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp123.769.350.325,00 dan Rp79.362.196.709,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 55,96% dibandingkan TA 2019. Kenaikan realisasi belanja modal dikarenakan porsi pagu anggaran belanja modal TA 2020 lebih besar dari pada pagu TA 2019,

sehingga realisasi belanja modal TA 2020 lebih tinggi dibanding dengan TA 2019.

Perbandingan Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik/turun	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.922.136.525	42.771.945.209	33.150.191.316	77,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.785.348.000	11.611.467.000	(9.826.119.000)	- 84,62
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	46.061.865.800	24.978.784.500	21.083.081.300	84,40
Jumlah Belanja Kotor	123.769.350.325	79.362.196.709	44.407.153.616	55,96
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	123.769.350.325	79.362.196.709	44.407.153.616	55,96

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp4.380.091.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.183.875.445,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Penanganan Pandemi COVID-19

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5=4/3
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	13,042,000,000	13,010,132,299	99.76
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	1,785,348,000	1,785,348,000	100
	JUMLAH	14,827,348,000	14,795,480,299	99.79

Dalam realisasi belanja modal dengan MAK COVID-19 terdapat realisasi belanja pemulihan ekonomi nasional (PEN), namun peruntukannya bukan sebagai belanja untuk penanganan pandemi COVID-19, rincian belanja tersebut sebagai berikut:

Belanja PEN dengan MAK COVID-19

No.	Uraian Kegiatan/Keluaran	Vol. Target	Vol. Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Raya Transyogi (Nomor Ruas 097), Jalan Letda Natsir (Nomor Ruas 097), Jalan Raya Cimanggis - Nagrak (Nomor Ruas 097) beserta supervisi	1 PKT	1 PKT	2,855,440,000	2,855,440,000	100.00%
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Cigelug (Bts Banten) Jasinga (Nomor Ruas 021) beserta supervisi	1 PKT	1 PKT	2,476,900,000	2,476,900,000	100.00%
3	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Bekasi - Tambun Cikarang (Bts. DKI Jakarta/Bekasi - Bts Bekasi/Karawang) (Nomor Ruas 001, 002, 003) beserta supervisi	1 PKT	1 PKT	3,823,984,000	3,823,984,000	100.00%
4	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ciawi - Benda (Nomor Ruas 025) beserta supervisi	1 PKT	1 PKT	2,438,926,000	2,438,925,800	100.00%
5	Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Raya Bogor	1 PKT	1 PKT	200,000,000	199,022,755	99.51%
6	Pengadaan dan Pemasangan Marka di Ruas Jalan Raya Transyogi	1 PKT	1 PKT	204,750,000	199,269,744	97.32%
7	Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar Kota Depok beserta Supervisi	1 PKT	1 PKT	1,785,348,000	1,785,348,000	100.00%
				13,785,348,000	13,778,890,299	99.95%

Anggaran belanja PEN dengan MAK COVID-19 pada tabel di atas merupakan penambahan anggaran dari realokasi antar program optimalisasi kinerja anggaran Kementerian Perhubungan. Pada saat penelaahan Revisi anggaran di DJA Kemenkeu, revisi antara program harus mendapatkan persetujuan DPR atau MAK kegiatan diubah menjadi MAK Covid sehingga BPTJ melakukan perubahan MAK dari semula MAK 532111 (Belanja Peralatan dan Mesin) menjadi MAK 532119 (Belanja Peralatan dan Mesin untuk penanganan Pandemi COVID-19).

Adapun rincian belanja modal dengan MAK COVID-19 yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19, sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan/Keluaran	Vol. Target	Vol. Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Thermal Imaging Camera	4 UNIT	4 UNIT	801,000,000	775,610,000	97%
2	Desinfectan Unit	6 UNIT	6 UNIT	201,000,000	201,000,000	100%
3	Thermal Imaging Camera	1 UNIT	1 UNIT	40,000,000	40,000,000	100%
				1,042,000,000	1,016,610,000.00	98%

Realisasi Belanja
Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi belanja modal tanah selama periode Tahunan Tahun 2020 dibandingkan periode sebelumnya.

Realisasi Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin
Rp75.922.136.525,
00

B. 5. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp75.922.136.525,00 dan Rp42.771.945.209,00 mengalami penurunan sebesar 77,50 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	Naik/turun	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.922.136.525	42.771.945.209	33.150.191.316	77,50
	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	75.922.136.525	42.771.945.209	33.150.191.316	77,50
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah Belanja	75.922.136.525	42.771.945.209	33.150.191.316	77,50

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.785.348.000,00 dan Rp11.611.467.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar 84,62% dibandingkan Realisasi TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	Naik/turun	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.785.348.000	11.611.467.000	(9.826.119.000)	(84,62)
	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	11.611.467.000	(9.826.119.000)	(84,62)
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah Belanja	-	11.611.467.000	(9.826.119.000)	(84,62)

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp 0

B.5. 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	Naik/turun	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-	-

Realisasi Belanja
Modal Lainnya Rp
46.061.865.800,00

B.5. 5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp46.061.865.800,00 dan Rp24.978.784.500,00 mengalami kenaikan sebesar 84,40% dibandingkan Realisasi TA 2019.

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik/turun	%
Belanja Modal Lainnya	46.061.865.800	24.978.784.500	21.083.081.300	84,40
	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	46.061.865.800	24.978.784.500	21.083.081.300	84
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah Belanja	46.061.865.800	24.978.784.500	21.083.081.300	84

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Uang Persediaan (UP)	-	-
Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	-
	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak dibayarkan langsung oleh pengguna jasa dengan mekanisme pembayaran melalui Aplikasi SIMPONI PNBP yang langsung terhubung dengan Bank yang ditunjuk dalam e-billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan. Sehingga Bendahara Penerimaan tidak mengelola kas tetapi hanya merekap pembayaran dari SIMPONI PNBP untuk selanjutnya dibuat laporan Realisasi Penerimaan PNBP.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp,00*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara

setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan
Pajak Rp0,00*

C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp262.400.000,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak berasal dari Perijinan Angkutan Umum tidak dalam trayek (taksi) yaitu dari Izin Penyelenggaraan untuk Perusahaan dan Kartu Pengawasan untuk armada/taksi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Petugas Perizinan yang menerbitkan SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dan Kartu Pengawasan dengan Bendahara Penerimaan yang menerbitkan ebilling, per tanggal 31 Desember 2020 atas piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp262.400.000,00 telah dibayar seluruhnya. Adapun rincian Piutang Per Perusahaan yang telah dibayarkan adalah sebagai berikut:

1. PT Blue Bird Taxi sebesar Rp22.400.000,00;
2. PT Blue Bird Tbk sebesar Rp17.400.000,00;
3. PT Pusaka Nuri Utama Rp3.000.000,00;
4. PT Blue Bird Pusaka Rp6.000.000,00;
5. PT Lintas Buana Taksi Rp13.200.000,00;
6. PT Silver Bird Rp50.800.000,00;
7. PT Maraute Jaya Rp13.200.000,00;
8. PT Luhur Satria Sejati Kencana Rp2.400.000,00;
9. PT Central Naga Europindo Rp85.000.000,00;
10. PT Cendrawasih Pertiwi Jaya Rp49.000.000,00;

*Bagian Lancar
TP/TGR Rp0,00*

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Bagian Lancar TPA
Rp0,00

C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -
Piutang Jangka
Pendek Rp0,00.

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(1.312.000,00).

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Perhitungan penyisihan piutang didasarkan pada kualitas piutang lancar yaitu nilai piutang dikalikan dengan 0,5 persen.

Per 31 Desember 2020 piutang menjadi sebesar Rp0,00 dari semula per 31 Desember 2019 sebesar Rp(1.312.000,00), hal ini dikarenakan piutang per 31 Desember 2020 telah disetor ke kas negara seluruhnya, sehingga tidak memerlukan adanya penyisihan piutang.

Belanja Dibayar
dimuka Rp0,00

C.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Persediaan Rp
1.767.892.257,00

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.765.492.827,00 dan Rp964.627.840,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*)

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis	NILAI T.A.2020	NILAI T.A. 2019
Barang Konsumsi	1.738.454.717	964.627.840
Bahan untuk Pemeliharaan	430.540	-
Suku Cadang	29.007.000	-
Pita Cukal, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1.767.892.257	964.627.840

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR
Rp0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

TPA
Rp0,00

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang Rp0,00

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tanah
Rp152.859.956.635
,00

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp152.859.956.635,00 dan Rp152.859.956.635,00. Tanah tersebut merupakan tanah pada 4 (empat) terminal tipe A di Wilayah Jabodetabek yang merupakan hibah dari pemerintah daerah/kota, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2020

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	19.701 m2	Terminal Poris Plawad - Kota Tangerang	21.326.665.771
2	21.415 m2	Terminal Baranangsiang - Kota Bogor	57.356.548.458
3	103.721 m2	Terminal Jatijajar - Kota Depok	66.768.167.406
4	25.995 m2	Terminal Pondok Cabe - Kota Tangerang Selatan	7.408.575.000
Jumlah			152.859.956.635

Peralatan dan
Mesin Rp
225.297.943.070,00

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp225.297.943.070,00 dan Rp173.096.272.318,00. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	173,096,272,318
Mutasi tambah:	113,113,183,933
Pembelian	12,662,861,895
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	60,784,210,181
Reklasifikasi Masuk	38,085,276,857
Pengembangan Nilai Aset	81,200,000
Pengembangan Melalui KDP	1,499,635,000
Mutasi Kurang:	(60,911,513,181)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(127,303,000)
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	(60,784,210,181)
Koreksi Pencatatan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	225,297,943,070
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(96,601,158,440)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	128,696,784,630

Diantara mutasi tambah, terdapat transaksi reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar senilai masing-masing Rp38.085.276.857,00 dan - Rp60.784.210.181,00. Transaksi reklasifikasi masuk dan keluar berasal dari penyelesaian pembangunan dengan KDP yang memiliki rincian barang lebih dari satu unit dalam satu pencatatan transaksi KDP sehingga perlu dilakukan pemecahan nilai dan rincian barang sesuai dengan jenis barang yang diperoleh. Selisih reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar senilai Rp22.698.933.324,00, perbedaan tersebut berasal dari KDP Peralatan dan Mesin yang didefinisikan menjadi ATB senilai Rp108.445.000,00, KDP Peralatan dan Mesin yang didefinisikan menjadi Aset Tetap Lainnya senilai Rp47.148.750,00, dan marka jalan senilai Rp22.543.339.547,00 yang tidak dicatat di aplikasi SIMAK karena tidak memenuhi kriteria aset tetap, dimana Marka Jalan mudah terhapus ketika terjadi *overlay* jalan dan kesulitan ketika dilakukan penghapusan. Berdasarkan PSAK No. 16 tentang kriteria aset tetap yaitu aset yang mempunyai wujud fisik, tidak ditujukan untuk dijual lagi, memiliki nilai material (harga aset tersebut bernilai cukup signifikan), memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun buku dan nilai manfaat

ekonominya bisa diukur dengan handal. Selain itu terdapat perolehan Marka Jalan yang berasal dari paket pembelian pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yaitu senilai Rp398.272.499,00, atas marka jalan tersebut tidak dicatat di aplikasi SIMAK. Marka Jalan yang tidak dicatat di SIMAK dibebankan pada akun beban barang non operasional lainnya.

Terdapat transaksi pengembangan nilai aset sebesar Rp81.200.000,00. Pengembangan tersebut terdiri dari pengembangan komputer berupa pembelian software windows 10 dan instalasi untuk tiga unit lap top senilai Rp4.400.000,00 dengan rincian NUP 149 - 150 sebesar Rp1.466.000,00 dan NUP 151 sebesar Rp1.468.000,00 dan pengembangan untuk alat angkutan senilai Rp76.800.000,00 berupa pembelian lampu strobo untuk dua unit jeep NUP 20 - 21 senilai Rp15.900.000,00, dua unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) NUP 19 - 20 senilai Rp15.900.000,00, empat unit Sepeda Motor NUP 19 - 20 senilai Rp14.000.000,00 dan NUP 17 - 18 senilai Rp31.000.000,00.

Terdapat transaksi pengembangan melalui KDP senilai Rp1.499.635.000,00. Transaksi tersebut merupakan pekerjaan pemindahan ruang kendali BPTJ tercatat dengan nama barang Alat Traffic Control and Monitoring NUP 1.

Terdapat transaksi Penghentiaan Aset Dari Penggunaan senilai - Rp127.303.000,00. Transaksi tersebut merupakan aset yang tidak lagi digunakan dalam operasi dikarenakan rusak dan akan dilakukan penghapusan.

C.15 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan Rp
149.304.046.043,00*

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp149.304.046.043,00 dan Rp147.276.868.043,00.

Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	147.276.868.043
Mutasi tambah:	2.027.178.000
Pembelian	241.830.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	
Reklasifikasi Masuk	
Pengembangan Nilai Aset	
Pengembangan Melalui KDP	1.785.348.000
Mutasi Kurang:	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2020	149.304.046.043
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(15.148.930.983)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	134.155.115.060

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan senilai Rp2.027.178.000 berasal dari transaksi pembelian dan pengembangan melalui KDP. Transaksi pembelian merupakan Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Parkir Sepeda pada Terminal Tipe A Pondok Cabe dan Pengadaan Fasilitas Parkir Sepeda pada Terminal Tipe A Jatijajar masing-masing senilai Rp63.549.455,00 (Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan senilai Rp178.281.209,00. Transaksi Pengembangan Melalui KDP merupakan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen senilai Rp1.785.348.000 yang merupakan lanjutan pembangunan terminal tipe A Jatijajar Kota Depok

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp26.827.564.023,00

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp26.827.564.023,00 dan Rp26.827.564.023,00. Tidak ada penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2020.

Aset Tetap Lainnya
Rp47.148.750,00

C.17 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp47.148.750,00 dan Rp0,00.

Aset Tetap Lainnya yang merupakan penambahan dari transaksi pembelian berupa lukisan pada dinding tercatat dengan nama aset Lukisan Lainnya sebanyak sembilan unit.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0,00

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan peralatan dan mesin dalam

pengerjaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020

Saldo per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	64.069.193.181
Perolehan/Penambahan KDP	17.761.873.883
Pengembangan KDP	46.307.319.298
Mutasi Kurang:	(64.069.193.181)
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	(64.069.193.181)
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 30 September 2020	-

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
(124.695.231.301,
00)*

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp(124.695.231.301,00) dan Rp(80.110.329.551,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 225.297.919.920	Rp 96.601.156.787	Rp 128.696.763.133
2	Gedung dan Bangunan	Rp 149.304.046.043	Rp 15.148.930.983	Rp 134.155.115.060
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 26.827.546.023	Rp 12.945.141.878	Rp 13.882.404.145
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 47.148.750	Rp -	Rp 47.148.750
Akumulasi Penyusutan		Rp401.476.660.736	Rp124.695.229.648	Rp276.781.431.088

*Aset Tak Berwujud
Rp
105.738.642.550
,00*

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp105.738.642.550,00 dan Rp59.398.730.200,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	59.398.730.200
Mutasi tambah:	48.293.177.350
Pembelian	1.388.968.050
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	44.681.899.300
Reklasifikasi Masuk	2.023.210.000
Pengembangan Nilai Aset	199.100.000
Pengembangan Melalui KDP	
Mutasi Kurang:	(1.953.265.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(38.500.000)
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	(1.914.765.000)
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2020	105.738.642.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(3.148.910.632)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	102.589.731.918

C.21. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

*Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp0,00*

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Mutasi Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020

Saldo per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	44.681.899.300
Perolehan/Penambahan KDP	9.593.199.460
Pengembangan KDP	35.088.699.840
Mutasi Kurang:	(44.681.899.300)
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	(44.681.899.300)
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 30 September 2020	-

*Aset Lain-lain Rp
165.803.000,00*

C.22. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 165.803.000,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	165.803.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	165.803.000
Mutasi Kurang:	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	165.803.000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	91.014.423
Nilai Buku per 30 September 2020	74.788.577

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp
(3.148.910.632)*

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp(3.148.910.188) dan Rp(1.649.725.814). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	105.738.642.550	Rp 3.057.896.209	Rp 102.680.746.341
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp 127.303.000	Rp 76.576.923	Rp 50.726.077
3	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 38.500.000	Rp 14.437.500	Rp 24.062.500
Akumulasi Penyusutan		Rp 105.904.445.550	Rp 3.148.910.632	Rp 102.755.534.918

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian uang muka dari KPPN sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Uang Persediaan (UP)	-	-
Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	-
	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0,00*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Ekuitas
Rp534.162.433.557
,00*

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp534.162.433.557,00 dan Rp478.925.051.694,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp4.529.521.700,
00*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp4.529.521.700,00 dan Rp3.720.260.935,00 Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 28,082 %. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	Naik (turun)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	91.743.000	710.935	91.032.065	12.804,56
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	4.429.650.000	6.297.450.000	(1.867.800.000)	(29,66)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8.128.500	-	8.128.500	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	200	-	200	-
Jumlah	4.529.521.700	6.298.160.935	(1.768.639.235)	(28,08)

*Beban Pegawai
Rp20.005.809.019,
00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.005.809.019,00 dan Rp18.802.861.091,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2020 meningkat sebesar 6,40% dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh bertambahnya pegawai pada TA 2020. Rincian Beban Pegawai Tahunan Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	%
Beban Gaji Pokok PNS	6.520.485.560	5.785.251.540	735.234.020	12,71
Beban Pembulatan Gaji PNS	98.722	86.456	12.266	14,19
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	480.675.060	405.487.292	75.187.768	18,54
Beban Tunj. Anak PNS	138.201.172	116.407.222	21.793.950	18,72
Beban Tunj. Struktural PNS	725.130.000	659.100.000	66.030.000	10,02
Beban Tunj. Fungsional PNS	19.790.000	14.010.000	5.780.000	41,26
Beban Tunj. PPh PNS	35.032.386	31.059.158	3.973.228	12,79
Beban Tunj. Beras PNS	346.095.180	301.069.160	45.026.020	14,96
Beban Uang Makan PNS	1.194.178.000	380.444.000	813.734.000	213,89
Beban Tunjangan Umum PNS	250.355.000	233.305.000	17.050.000	7,31
Beban Uang Lembur	263.332.000	297.762.000	(34.430.000)	(11,56)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	10.032.435.939	10.578.879.263	(546.443.324)	(5,17)
	-	-	-	-
Jumlah	20.005.809.019	18.802.861.091	1.202.947.928	6,40

Beban Persediaan
Rp2.485.144.762,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.485.144.762,00 dan Rp3.626.912.641,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 50,40 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh pemotongan anggaran untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 dan keperluan persediaan pendukung operasional kantor yang menurun karena diterapkannya kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*) selama masa pandemi TA 2020. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	%
Beban Persediaan konsumsi	2.437.382.762	3.626.912.641	(1.348.531.661)	(37,18)
Beban persediaan lainnya	47.762.000	-	-	-
Jumlah	2.485.144.762	3.626.912.641	(1.348.531.661)	(37,18)

*Beban Barang dan
Jasa
Rp42.911.956.784,
00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp65.455.296.358,00 dan Rp34.066.529.855,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 24,12 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Pada Tahunan Tahun 2019. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	%
Beban Keperluan Perkantoran	19,071,743,470	13,965,129,100	5,106,614,370	36.57
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	304,869,620	379,307,225	(74,437,605)	(19.62)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	758,920,000	402,140,000	356,780,000	88.72
Beban Barang Operasional Lainnya	726,151,000	717,046,000	9,105,000	1.27
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	233,200,000	-	233,200,000	-
Beban Bahan	1,360,382,454	363,779,570	996,602,884	273.96
Beban Honor Output Kegiatan	353,750,000	863,770,000	(510,020,000)	(59.05)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	33,772,883,915	11,535,804,397	22,237,279,518	192.77
Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	1,366,661,100	-	1,366,661,100	-
Beban Langganan Listrik	2,077,158,291	1,130,666,258	946,492,033	83.71
Beban Langganan Telepon	14,564,619	19,691,652	(5,127,033)	(26.04)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	677,791,489	883,116,275	(205,324,786)	(23.25)
Beban Jasa Konsultan	980,600,000	663,330,000	317,270,000	47.83
Beban Sewa	1,099,715,000	1,080,615,878	19,099,122	1.77
Beban Jasa Profesi	2,231,380,000	1,650,045,000	581,335,000	35.23
Beban Jasa Lainnya	66,000,000	1,400,000	64,600,000	4,614.29
Beban Jasa Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	313,500,000	-	313,500,000	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	46,025,400	410,888,500	(364,863,100)	(88.80)
	-	-	-	-
Jumlah	65,455,296,358	34,066,529,855	31,388,766,503	92.14

*Beban
Pemeliharaan Rp
14.394.674.743,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.394.674.743,00 dan Rp6.260.101.021,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 129,94 persen dibandingkan dengan Tahun 2019. Peningkatan beban pemeliharaan disebabkan adanya peningkatan jumlah aset dari tahun sebelumnya yang perlu dilakukan pemeliharaan. Rincian Beban

Pemeliharaan untuk Tahunan Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.186.977.138	4.340.311.632	1.846.665.506	42,55
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.704.406.321	1.818.148.289	3.886.258.032	213,75
Beban Pemeliharaan Jaringan	98.482.504	99.957.000	(1.474.496)	(1,48)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.086.030	1.684.100	(598.070)	(35,51)
Beban Persediaan suku cadang	2.403.722.750	-	2.403.722.750	
Jumlah	14.394.674.743	6.260.101.021	8.134.573.722	129,94

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp21.340.615.898,
00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp21.340.615.898,00 dan Rp26.039.655.671,00.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 18,05 persen. Penurunan beban perjalanan dinas dikarenakan berkurangnya intensitas perjalanan dinas selama masa pandemi COVID-19 pada tahun anggaran 2020. Rincian beban perjalanan dinas untuk semester I Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	%
Beban Perjalanan Biasa	10.623.490.481	14.898.832.219	(4.275.341.738)	(28,70)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	128.669.200	76.200.000	52.469.200	68,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.646.429.343	2.100.330.428	(453.901.085)	(21,61)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.942.026.874	8.434.412.434	507.614.440	6,02
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	529.880.590	(529.880.590)	(100,00)
Jumlah	21.340.615.898	26.039.655.671	(4.699.039.773)	(18,05)

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp
46.084.084.915,00*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp46.084.084.915,00 dan Rp36.046.634.213,00.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.903.104.456	30.651.481.832	9.251.622.624	30.
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.013.914.570	2.677.163.763	136.750.807	4.
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.714.162.139	1.714.162.139	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	4.989.666	4.989.666	-	-
Beban Amortisasi Software	1.417.795.395	798.836.813	618.958.582	77.
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.812.500	-	4.812.500	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	25.307.842	-	25.307.842	-
Jumlah	46.084.086.568	36.046.634.213	10.037.452.355	27.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp-
1.312.000,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-1.312.000,00 dan Rp0,00.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan TA 2020 dan 2019.

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	(1.312.000)	-	(1.312.000)	-
Jumlah	(1.312.000)	-	(1.312.000)	-

*Beban Lain-Lain
Rp0,00*

D.11 Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-Lain untuk 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Surplus/(defisit)
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp580.800,00*

D.12 SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai Rp580.800,00 dan Rp0,00.

*Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahunan TA 2020 dan
2019*

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(580,800)	-	(580,800)	-
Jumlah	(580,800)	-	(580,800)	-

Beban Kerugian Pelepasan Aset senilai Rp(580.000,00) merupakan beban yang muncul dari penghapusan Blanko Kartu Pengawasan pada aplikasi persediaan. Penghapusan Blanko Karu Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil *stockopname* persediaan nomor BA.12 BPTJ TAHUN 2020 pada tanggal 21 Juli 2020 yang dilakukan oleh Tim dari BPTJ dan Inspektorat Jenderal Kemenhub sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019. Berdasarkan *stockopname* tersebut terdapat Blanko Kartu Pengawasan yang tidak ditemukan sebanyak 160 set dengan nomor seri 81569 s.d. 81729 senilai Rp580.800,00 (Rp81.569,00 x 160 set) yang terdiri dari 148 set Kartu Pengawasan Kuning (Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek) dan 12 set Kartu Pengawasan Biru (Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek). Atas blanko yang tidak ditemukan tersebut telah disetor ke kas negara senilai Rp580.800,00 pada tanggal 05 Agustus 2020 dengan NTPN AFBBA48VU9QBI9LK.

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp649.416.469,00

D.13 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp649.416.469,00 dan Rp105.120.291,00.

*Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahunan TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	2020	2019	NAIK (TURUN)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	100	270	(170)	(62,96)
Penerimaan Kembali Beban Berang Tahun Anggaran Yang Lalu	299.095.935	299.501.980	(406.045)	(0,14)
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	153.503.555	-	153.503.555	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	296.410.455	460.838.298	(164.427.843)	(35,68)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(99.593.576)	(655.220.257)	555.626.681	(84,80)
Beban Persediaan Rusak/Usang	-	-	-	-
Jumlah	649.416.469	105.120.291	544.296.178	517,78

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.14 POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa 31 Desember 2020 senilai Rp0,00 dan 30 Juni 2019 senilai Rp0,00.

Defisit LO Rp.-
164.585.957.979,00

D.15 SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp-164.585.957.979,00 dan Rp-118.440.725.266,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp478.925.051.694
,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp478.925.051.694,00 dan Rp438.155.645.199,00.

Defisit LO
Rp(164.585.957.97
9,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(164.585.957.979,00) dan Rp(118.440.725.266,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp-0,00

E.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp0,00

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-2.831.216.640,00.

Koreksi Lain-Lain
Rp. 0,00

E.6 Lain-lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi lain-lain untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Transaksi Antar
Entitas Rp
219.825.760.680,00

E.7 Transaksi antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp219.825.760.680,00 dan Rp162.041.348.401. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas	Nilai	Keterangan
Ditagihkan ke Entitas Lain	225,070,281,970	Realiasi Belanja Pegawai, Barang dan Modal
Diterima dari Entitas Lain	- 5,244,521,290	Realiasi PNPB
Transfer Keluar	-	
Transfer Masuk	-	
Pengesahan Hibah Langsung	-	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	
Jumlah	219,825,760,680	

Kenaikan/
Penurunan Ekuitas
Rp55.237.381.863,
00

E.8 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp55.239.802.701,00 dan Rp40.769.406.495,00.

Ekuitas Akhir Rp
534.164.854.395,00

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp534.164.854.395,00 dan Rp478.925.051.694,00.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Telah dilakukan ADTT (Audit dengan Tujuan Tertentu) Inspektorat Jenderal terkait saldo persediaan berupa kartu pengawasan dan telah dilakukan koreksi saldo awal per 1 Januari 2020 (saldo akhir 31 Desember 2019) dari semula 115.748 lembar menjadi 105.816 lembar hal ini diakibatkan kurang catat transaksi mutasi keluar kartu pengawasan pada semester II TA 2019.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah berdiri pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menerima hibah aset dari Pemerintah Daerah Kota di wilayah Jabodetabek melalui penandatanganan berita acara serah terima personil, pendanaan, prasarana dan sarana, dan dokumen (P3D). Hibah P3D tersebut berasal dari empat terminal Tipe A di Jabodetabek yaitu Terminal Baranangsiang Kota Bogor, Poris Plawad Kota Tangerang, Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan dan Jatijajar Kota Depok. Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pemda Kota (Bupati/Walikota) masing-masing daerah dengan Sekretaris Jenderal Kemenhub. Atas hibah tersebut BPTJ telah mencatat sebagai BMN ke dalam Aplikasi SIMAK BMN berdasarkan persetujuan register hibah dari Kanwil Perbendaharaan Wilayah DKI Jakarta dan Memo Persetujuan Hibah Langsung Barang dan Jasa (MPHLBJS) dari KPPN Jakarta IV serta menginput aset dalam bentuk tanah ke dalam aplikasi SIMANTAP.

Dari Empat Lahan terminal yang diserahkan ke BPTJ satu lahan telah bersertifikat dan tiga lahan belum bersertifikat a.n Pemerintah Republik

Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan. Adapun posisi aset lahan terminal sebagai berikut:

1. Lahan terminal Poris Plawad seluas 1,9 hektar, pada tahun 2020 telah masuk dalam program percepatan sertifikasi nasional (Pronas) Kanwil DJKN Banten sehingga pada tahun 2020 posisi lahan/tanah telah bersertifikat. Lahan terminal Poris Plawad bersertifikat Hak Pakai No. 00014, penerbitan sertifikat di Tangerang tanggal 12 Mei 2020;
2. Lahan terminal Baranangsiang seluas 2,1 hektar, posisi sertifikat masih atas nama Pemerintah Kota Bogor dan telah dikerjasamakan dalam bentuk BGS (Bangun Guna Serah) oleh Pemerintah Kota Bogor dengan PT PGI sampai dengan tahun 2042, saat ini BPTJ sedang proses Balik Nama Sertifikat (dari semula Pemkot Bogor ke Pemerintah RI c.q. Kemenhub) dan proses perubahan pihak yang menandatangani BGS. Perubahan pihak yang menandatangani BGS menunggu tanggapan DJKN perihal LO (legal opinion) dari Kejaksaan atas upaya PT PGI terkait pemulihan masa BGS, dimana sejak BGS ditandatangani antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT PGI tahun 2014, sampai saat ini PT PGI belum melakukan pembangunan;
3. Lahan Terminal Pondok Cabe seluas 2,5 hektar, posisi saat ini, proses sertifikasi pada tahap pembuatan peta bidang di BPN Kota Tangerang Selatan;
4. Lahan Terminal Jatijajar, sertifikat masih atas nama perorangan (belum digabung) sebanyak 96 sertifikat dengan luas 10,3 hektar. Saat ini sedang proses sertifikasi di BPN Kota Depok dengan kondisi 8,7 hektar sertifikat asli (15 sertifikat) belum ditemukan dan 1,6 hektar bersertifikat asli (81 sertifikat). BPN akan menerbitkan sertifikat a.n. Pemerintah RI c.q. Kemenhub jika sertifikat asli bisa ditunjukkan atau ada laporan kehilangan dan pengumuman di media. Atas sertifikat yang belum ditemukan tersebut, BPTJ dan Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah melaporkan sertifikat yang belum ditemukan tersebut ke Pihak Kepolisian (Dirreskrimum Polda Metro Jaya) dan telah mengumumkan kehilangan sertifikat tersebut di media (Jurnal Depok dan Harian Sederhana) tanggal 12 Februari 2020. Dirreskrimum Polda Metro Jaya telah bersurat kepada Kepala BPN Kota Depok perihal Pengantar Laporan Polisi Kehilangan Sertifikat Hak Milik tanggal 27 Mei 2020, Dengan adanya surat dari Polda tersebut, maka BPN bisa melakukan proses lanjut penerbitan

sertifikat. Saat ini sedang diproses penerbitan sertifikat oleh BPN Kota Depok.

Saat ini BPTJ sedang proses permohonan penerbitan SK Hak Sertifikat tanah terminal Jatijajar ke BPN Kota Depok dengan total luas lahan 10,3 hektar. Berdasarkan hasil pembahasan dengan BPN Kota Depok sertifikat akan dipecah menjadi lima peta bidang, sehingga dilakukan perubahan KIB dari semula satu KIB menjadi lima KIB.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA
ESELON I

: 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
: 13 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Kode Lap : LRAF.W.1
Tanggal : 29/04/21 12:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_es1_komparatif--

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	5,244,521,290	(5,244,521,290)	0	0	6,335,263,186	(6,335,263,186)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	5,244,521,290	(5,244,521,290)	0	0	6,335,263,186	(6,335,263,186)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	20,292,987,000	20,005,809,019	287,177,981	99	18,804,700,000	18,802,861,091	1,838,909	100
	BELANJA BARANG	83,461,317,000	81,295,122,626	2,166,194,374	97	70,480,996,000	70,211,553,787	269,442,213	100
	BELANJA MODAL	123,881,586,000	123,769,350,325	112,235,675	100	79,708,224,000	79,362,196,709	346,027,291	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	227,635,890,000	225,070,281,970	2,565,608,030	99	168,993,920,000	168,376,611,587	617,308,413	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 13 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 29/04/21 11:43
Halaman : 1
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,529,521,700	6,298,160,935	(1,768,639,235)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,529,521,700	6,298,160,935	(1,768,639,235)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	4,529,521,700	6,298,160,935	(1,768,639,235)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	20,005,809,019	18,802,861,091	1,202,947,928	-
Beban Persediaan	2,485,144,762	3,626,912,641	(1,141,767,879)	-
Beban Barang dan Jasa	65,455,296,358	34,066,529,855	31,388,766,503	-
Beban Pemeliharaan	14,394,674,743	6,260,101,021	8,134,573,722	-
Beban Perjalanan Dinas	21,340,615,898	26,039,655,671	(4,699,039,773)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN
ESELON I

: 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
: 13 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 29/04/21 11:43
Halaman : 2
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	46,084,086,568	36,046,634,213	10,037,452,355	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,312,000)	1,312,000	(2,624,000)	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	169,764,315,348	124,844,006,492	44,920,308,856	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(165,234,793,648)	(118,545,845,557)	(46,688,948,091)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(580,800)	0	(580,800)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	580,800	0	580,800	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	649,416,469	105,120,291	544,296,178	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	749,010,045	760,340,548	(11,330,503)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	99,593,576	655,220,257	(555,626,681)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	648,835,669	105,120,291	543,715,378	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(164,585,957,979)	(118,440,725,266)	(46,145,232,713)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(164,585,957,979)	(118,440,725,266)	(46,145,232,713)	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN TAHUN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I

: 022
: 13

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Kode Lap : Lpe.es1

Tanggal : 29/04/21 11:43

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_es1

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	478,925,051,694	438,155,645,199	40,769,406,495	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(164,585,957,979)	(118,440,725,266)	(46,145,232,713)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(2,831,216,640)	2,831,216,640	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(2,831,216,640)	2,831,216,640	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	219,825,760,680	162,041,348,401	57,784,412,279	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	55,239,802,701	40,769,406,495	14,470,396,206	-
EKUITAS AKHIR	534,164,854,395	478,925,051,694	55,239,802,701	-

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 13

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Tgl. Cetak 28/04/2021 12:02 AM
lap_neraca_es1_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	262,400,000	(262,400,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(1,312,000)	1,312,000	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	261,088,000	(261,088,000)	(100.00)
Persediaan	1,767,892,257	964,627,840	803,264,417	83.27
JUMLAH ASET LANCAR	1,767,892,257	1,225,715,840	542,176,417	44.23
ASET TETAP				
Tanah	152,859,956,635	152,859,956,635	0	0.00
Peralatan dan Mesin	225,297,943,070	173,096,272,318	52,201,670,752	30.16
Gedung dan Bangunan	149,304,046,043	147,276,868,043	2,027,178,000	1.38
Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,827,564,023	26,827,564,023	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	47,148,750	0	47,148,750	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(124,695,231,301)	(80,110,329,551)	(44,584,901,750)	55.65
JUMLAH ASET TETAP	429,641,427,220	419,950,331,468	9,691,095,752	2.31
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	105,738,642,550	59,398,730,200	46,339,912,350	78.01
Aset Lain-lain	165,803,000	0	165,803,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,148,910,632)	(1,649,725,814)	(1,499,184,818)	90.87
JUMLAH ASET LAINNYA	102,755,534,918	57,749,004,386	45,006,530,532	77.93
JUMLAH ASET	534,164,854,395	478,925,051,694	55,239,802,701	11.53

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	534,164,854,395	478,925,051,694	55,239,802,701	11.53
JUMLAH EKUITAS	534,164,854,395	478,925,051,694	55,239,802,701	11.53
JUMLAH EKUITAS	534,164,854,395	478,925,051,694	55,239,802,701	11.53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	534,164,854,395	478,925,051,694	55,239,802,701	11.53

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI

: 13

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Tgl. Cetak 29/04/2021 11:43 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,738,454,717	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	430,540	0
0.0	117114	Suku Cadang	29,007,000	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	152,859,956,635	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	225,297,943,070	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	149,304,046,043	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	26,627,977,383	0
0.0	134113	Jaringan	199,586,640	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	47,148,750	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	96,601,158,440
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	15,148,930,983
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	12,922,688,381
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	22,453,497
0.0	162151	Software	6,836,669,050	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	98,901,973,500	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	127,303,000	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	38,500,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	76,576,923
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,057,896,209
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	14,437,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	225,070,281,970
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,244,521,290	0
0.0	391111	Ekuitas	0	478,925,051,694
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	91,743,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	4,429,650,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,128,500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	100
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	299,095,935
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	153,503,555
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	200
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	296,410,455
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	6,520,485,560	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI

: 13

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Tgl. Cetak 29/04/2021 11:43 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	98,772	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	50
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	480,675,060	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	138,201,172	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	725,130,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	19,790,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	35,032,386	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	346,095,180	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,194,178,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	250,355,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	263,332,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	10,032,435,939	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	19,071,743,470	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	304,869,620	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	767,320,000	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	8,400,000
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	726,151,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	233,200,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,360,382,454	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	353,750,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	33,772,883,915	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,366,661,100	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,077,158,291	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	14,564,619	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	677,791,489	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	980,600,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,099,715,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,237,535,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	6,155,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	66,000,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	313,500,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,186,977,138	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,704,406,321	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	98,482,504	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	10,642,200,091	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	18,709,610
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	128,669,200	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,655,744,343	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	9,315,000
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,957,561,874	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 13

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Tgl. Cetak 29/04/2021 11:43 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	15,535,000
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39,903,104,456	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,013,914,570	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,714,162,139	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	4,989,666	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,417,795,395	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	4,812,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	25,307,842	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,437,382,762	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,086,030	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	2,403,722,750	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	47,762,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	99,593,576	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	0	1,312,000
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	46,025,400	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	580,800	0
JUMLAH			837,177,434,002	837,177,434,002

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 13

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Tgl. Cetak 29/04/2021 12:30 AM
lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	2,565,608,030	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	5,244,521,290	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	6,525,534,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	99,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	481,181,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	138,295,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	727,270,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	19,826,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	35,397,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	346,610,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	1,224,336,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	250,745,000
2.0	511192	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	0	0
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	318,492,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	10,225,202,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	19,418,825,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	391,158,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	772,330,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	765,587,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	294,000,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	1,366,172,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	361,100,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	10,911,955,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,454,579,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	3,466,131,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,317,012,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	2,166,792,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	18,000,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	950,000,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	980,800,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	1,149,800,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	2,253,153,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	90,680,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	314,500,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	6,191,500,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	6,199,766,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	100,000,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	10,701,355,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	129,203,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,688,434,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 13

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Tgl. Cetak 29/04/2021 12:30 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	9,008,485,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	62,528,998,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	13,042,000,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	242,487,000
2.0	533119	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,785,348,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	46,282,753,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	91,743,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	4,692,050,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,128,500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	100
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	299,095,935
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	153,503,555
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	200
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6,520,485,560	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	98,772	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	50
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	480,675,060	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	138,201,172	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	725,130,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	19,790,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	35,032,386	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	346,095,180	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,194,178,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	250,355,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	263,332,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	10,032,435,939	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	19,071,743,470	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	304,869,620	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	767,320,000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	8,400,000
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	726,151,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	233,200,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,360,382,454	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	353,750,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,831,271,842	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,366,661,100	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,226,467,535	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2,270,514,345	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI

: 13

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Tgl. Cetak 29/04/2021 12:30 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,077,158,291	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	14,564,619	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	677,791,489	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	980,600,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,099,715,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,237,535,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	6,155,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	66,000,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	313,500,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,186,977,138	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,704,406,321	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	98,482,504	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	10,642,200,091	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	18,709,610
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	128,669,200	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,655,744,343	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	9,315,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,957,561,874	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	15,535,000
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62,462,072,676	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	13,010,132,299	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	241,830,000	0
3.0	533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1,785,348,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	46,269,967,350	0
JUMLAH			232,938,525,950	232,938,525,950